

Pengaruh Variabel Ekonomi dan Sosial terhadap Tingkat Kemiskinan: Studi Kasus Provinsi Jawa Barat Tahun 2017–2023

Hany Nisrina Adipura
Universitas Padjadjaran

Alamat :
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Padjadjaran Jatinangor
Jln. Ir. Soekarno km. 21. Jatinangor, Kab. Sumedang 45363, Jawa Barat, Indonesia.

Korespondensi penulis: hany22001@mail.unpad.ac.id

Abstract. *Poverty remains one of the most critical development issues in Indonesia, and West Java Province is no exception, given the significant disparity in poverty rates across its regencies and municipalities. This study aims to analyze the extent to which the Human Development Index (HDI), Gross Regional Domestic Product (GRDP) per capita, the Open Unemployment Rate, and the Gini Ratio affect poverty rates across 27 regencies and municipalities in West Java over the 2017–2023 period. The panel data utilized were obtained from Statistics Indonesia (BPS) and West Java Open Data, encompassing 189 observations. Panel data regression was employed as the primary analytical method. Based on the Chow and Hausman tests, the Fixed Effect Model (FEM) was selected as the most appropriate specification; cluster-robust standard errors were then applied to address heteroskedasticity and autocorrelation. The findings reveal that GRDP per capita has a significant negative effect on poverty, whereas the Open Unemployment Rate and the Gini Ratio significantly increase it. Conversely, the HDI demonstrates no significant effect in the FEM specification, despite showing significant impacts in the Common Effect and Random Effect models. Based on these findings, this study recommends that strengthening regional economies, expanding employment opportunities, and promoting income redistribution policies be prioritized to alleviate poverty in West Java.*

Keywords: *Poverty, HDI, GRDP, Unemployment, Income Inequality, Panel Data, West Java*

Abstrak. Kemiskinan masih menjadi salah satu isu pembangunan paling krusial di Indonesia, dan Provinsi Jawa Barat tidak terkecuali, mengingat tingkat kemiskinan antarkabupaten/kotanya menunjukkan kesenjangan yang cukup signifikan. Studi ini disusun untuk mengukur sejauh mana Indeks Pembangunan Manusia (IPM), PDRB per kapita, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan Rasio Gini memengaruhi tingkat kemiskinan pada 27 kabupaten/kota di Jawa Barat sepanjang 2017–2023. Data panel yang digunakan bersumber dari Badan Pusat Statistik dan Open Data Jawa Barat, mencakup 189 titik observasi. Regresi data panel menjadi alat analisis utama, dan berdasarkan Uji Chow maupun Uji Hausman, Fixed Effect Model (FEM) terpilih sebagai model yang paling sesuai; standard error robust-cluster kemudian diterapkan untuk mengoreksi heteroskedastisitas dan

autokorelasi yang muncul pada model tersebut. Temuan menunjukkan PDRB per kapita berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan, sementara TPT dan Rasio Gini justru mendorongnya naik secara signifikan. IPM di sisi lain tidak terbukti berpengaruh signifikan pada model FEM, kendati pada model Common Effect dan Random Effect pengaruhnya signifikan. Atas dasar temuan ini, studi merekomendasikan agar penguatan ekonomi daerah, perluasan lapangan kerja, dan kebijakan pemerataan pendapatan dijadikan prioritas dalam upaya menekan kemiskinan di Jawa Barat.

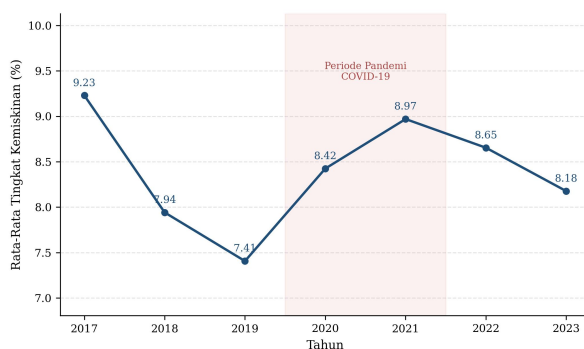
Kata kunci: Kemiskinan, IPM, PDRB, Pengangguran, Ketimpangan Pendapatan, Data Panel, Jawa Barat

LATAR BELAKANG

Hampir semua negara berkembang, Indonesia termasuk di dalamnya, masih menghadapi persoalan kemiskinan sebagai salah satu tantangan pembangunan yang paling mendasar. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka kemiskinan nasional pada Maret 2023 berada di kisaran 9,36 persen, turun dibanding periode sebelumnya, namun tetap menjadi tantangan besar bagi pembangunan nasional (Badan Pusat Statistik, 2023b). Sebagai provinsi berpenduduk terbanyak di Indonesia, Jawa Barat pun turut menghadapi persoalan kemiskinan yang rumit dan berbeda-beda karakteristiknya di setiap wilayah.

Isu ini menjadi kian penting mengingat kemiskinan tidak sekadar menggambarkan rendahnya pendapatan rumah tangga, tetapi juga terkait langsung dengan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya tujuan pertama tentang pengentasan kemiskinan dalam segala bentuknya. Mengingat Jawa Barat menyumbang kontribusi ekonomi terbesar kedua di Pulau Jawa setelah DKI Jakarta, keberhasilannya menekan angka kemiskinan turut berdampak besar terhadap capaian pengentasan kemiskinan secara nasional.

Kesenjangan tingkat kemiskinan antarkabupaten/kota di Jawa Barat juga tergolong signifikan. Pada 2023, Kota Depok mencatatkan angka kemiskinan terendah, yaitu 2,38 persen, sedangkan Kabupaten Indramayu berada di posisi tertinggi dengan 12,13 persen, yaitu selisih lebih dari lima kali lipat dalam satu provinsi yang sama. Secara rata-rata, angka kemiskinan 27 kabupaten/kota di Jawa Barat bergerak dari 9,23 persen pada 2017 menuju 8,18 persen pada 2023, sempat naik selama masa pandemi COVID-19 (2020–2021) sebelum akhirnya turun kembali (Badan Pusat Statistik, 2024), seperti tergambar pada Gambar 1.



Gambar 1. Rata-Rata Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat, 2017–2023 (%)

Sumber: Badan Pusat Statistik (2024), diolah dari 27 kabupaten/kota.

Ketimpangan pembangunan antarwilayah turut memperlebar kesenjangan tersebut. Wilayah perkotaan umumnya menyediakan peluang ekonomi yang lebih luas dibanding wilayah perdesaan, sehingga memicu arus urbanisasi yang pada gilirannya memperketat persaingan atas sumber daya di kota-kota besar. Dari sinilah muncul empat pertanyaan pokok yang menjadi fokus studi ini: apakah kualitas sumber daya manusia, yang direpresentasikan oleh IPM, mampu mendorong produktivitas dan pendapatan; apakah pertumbuhan ekonomi daerah, yang tercermin dari PDRB, dapat menciptakan kesejahteraan; apakah pasar tenaga kerja, yang diukur melalui TPT, mampu menyerap angkatan kerja secara memadai; dan apakah pemerataan pendapatan, yang direfleksikan oleh Rasio Gini, telah tercapai seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang berlangsung.

Berbagai riset terbaru di sejumlah provinsi lain di Pulau Jawa pun masih menunjukkan hasil yang tidak seragam mengenai determinan kemiskinan. Ningsih, Bomantara, dan Rahmawati (2024) mendapati bahwa di kabupaten/kota Jawa Barat pada 2023, IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, sementara pertumbuhan ekonomi justru berkorelasi positif dengannya, yang mengindikasikan pertumbuhan belum sepenuhnya inklusif di sebagian wilayah. Berbeda halnya dengan Falah dan Rahmawati (2024) yang meneliti Jawa Timur dan mendapati bahwa PDRB per kapita maupun IPM sama-sama berpengaruh negatif terhadap kemiskinan, baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Ketidakteraturan hasil antarwilayah dan antarperiode ini menegaskan bahwa relasi antara indikator makroekonomi-sosial dengan kemiskinan sangat bergantung pada konteks, sehingga kajian yang secara khusus menyoroti karakteristik 27 kabupaten/kota Jawa Barat dengan rentang data yang lebih panjang (2017–2023) serta pendekatan data panel yang mampu mengendalikan heterogenitas antarwilayah menjadi relevan untuk dilakukan.

Bertolak dari latar belakang tersebut, studi ini mengangkat persoalan tentang bagaimana IPM, PDRB per kapita, TPT, dan Rasio Gini memengaruhi tingkat kemiskinan di 27 kabupaten/kota Jawa Barat pada 2017–2023, baik secara parsial maupun simultan. Studi ini disusun untuk: (1) mengukur pengaruh IPM terhadap tingkat kemiskinan; (2) mengukur pengaruh PDRB per kapita terhadap tingkat kemiskinan; (3) mengukur pengaruh TPT terhadap tingkat kemiskinan; (4) mengukur pengaruh Rasio Gini terhadap tingkat kemiskinan; serta (5) mengukur pengaruh keempat variabel tersebut secara bersama-sama terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten/kota Jawa Barat pada 2017–2023. Temuan studi ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam menyusun strategi pengentasan kemiskinan yang lebih tepat sasaran dan efisien di Provinsi Jawa Barat

KAJIAN TEORITIS

Kemiskinan

Di negara-negara berkembang, kemiskinan bukan semata soal minimnya harta benda, melainkan juga mencerminkan ketidakberdayaan di ranah sosial maupun politik (Suryawati, 2004). Sebagai masalah pembangunan yang bersifat multidimensional, kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan pendapatan, tetapi juga rendahnya mutu kesehatan dan pendidikan serta lemahnya kemampuan individu untuk memperbaiki kesejahtraannya sendiri.

Cara pandang multidimensional ini selaras dengan pendekatan kapabilitas yang digagas Sen (1999), yang memaknai kemiskinan bukan sekadar rendahnya pendapatan, melainkan terbatasnya kapabilitas seseorang untuk menjalani kehidupan yang menurutnya

layak, termasuk akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi. Karena itu, indikator moneter seperti persentase penduduk miskin sebaiknya dipandang sebagai proksi terukur dari fenomena yang cakupannya jauh lebih luas.

World Bank, sebagaimana dikutip dalam Bappeda (2013), menyebut kemiskinan ditandai oleh kondisi hidup yang tidak memadai: minimnya akses layanan kesehatan sehingga penduduk yang sakit tidak sanggup membiayai pengobatan, terbatasnya peluang pendidikan, dan tingginya angka buta huruf. Selain itu, terdapat pula keterbatasan kesempatan kerja, minimnya akses terhadap air bersih, serta rasa tidak berdaya yang menyertai kondisi tersebut.

Sementara untuk mengukur kemiskinan secara operasional, BPS mengacu pada Handbook on Poverty and Inequality terbitan World Bank (Haughton & Khandker, 2009), yang mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan ekonomi dari sisi pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dasar. Seseorang dikategorikan miskin apabila rata-rata pengeluaran bulannya berada di bawah garis kemiskinan yang telah ditetapkan.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM adalah indikator komposit yang merangkum capaian pembangunan manusia di suatu wilayah melalui tiga dimensi dasar: umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak (BPS, 2024). Secara teoretis, semakin baik kualitas modal manusia yang tergambar dari IPM, semakin tinggi pula produktivitas tenaga kerja yang pada gilirannya menekan angka kemiskinan.

Landasan teoretis ini bersumber dari teori modal manusia (human capital) yang dikembangkan Schultz (1961) dan Becker (1964), yang memandang pendidikan dan kesehatan sebagai investasi yang mendongkrak produktivitas serta pendapatan individu di masa depan. Dengan kata lain, wilayah dengan capaian pembangunan manusia lebih tinggi diperkirakan memiliki angkatan kerja yang lebih produktif dan risiko kemiskinan yang lebih kecil. Namun demikian, karena hasil investasi modal manusia umumnya baru terasa dalam jangka panjang, kaitan antara IPM dan kemiskinan pada data tahunan berjangka pendek tidak selalu tampak kuat.

Meskipun demikian, bukti empiris mengenai relasi IPM dan kemiskinan masih beragam. Syaifullah dan Malik (2017) mendapati IPM berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan di empat negara ASEAN, senada dengan Silaban dkk. (2020) yang menemukan hal serupa untuk jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara. Sebaliknya, Zanzibar dkk. (2024) justru menemukan arah hubungan yang berlawanan (positif signifikan) di Jawa Timur, sementara Anandanisa (2018) tidak menemukan pengaruh IPM yang signifikan terhadap kemiskinan di Papua, dan Susilowati serta Suliswanto (2015) juga tidak menemukan kaitan antara komponen IPM dengan kemiskinan di Indonesia. Ragam temuan ini menunjukkan bahwa hubungan IPM-kemiskinan sangat tergantung konteks dan karakteristik wilayah yang dikaji.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Menurut Badan Pusat Statistik (2024), PDRB pada intinya merupakan total nilai tambah yang diciptakan seluruh unit usaha di suatu wilayah. PDRB per kapita mencerminkan rata-rata pendapatan penduduk di wilayah tersebut, dan secara teoretis, laju pertumbuhannya

yang tinggi diharapkan dapat menurunkan kemiskinan melalui perluasan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat.

Argumen ini diperkuat oleh literatur tentang elastisitas kemiskinan terhadap pertumbuhan. Ravallion dan Chen (1997) memperlihatkan bahwa naiknya pendapatan rata-rata berkaitan erat dengan turunnya kemiskinan absolut di negara berkembang, sedangkan Dollar dan Kraay (2002) mendapati bahwa pendapatan 20 persen kelompok termiskin cenderung tumbuh sebanding dengan pendapatan rata-rata. Namun demikian, seberapa besar dampak pertumbuhan terhadap penurunan kemiskinan sangat bergantung pada kondisi distribusi pendapatan sebelumnya, sehingga wilayah dengan ketimpangan tinggi membutuhkan pertumbuhan yang jauh lebih besar untuk mencapai penurunan kemiskinan yang setara (Ravallion, 1997).

Silastri (2017) menemukan pengaruh negatif signifikan PDRB terhadap kemiskinan di Kabupaten Kuantan Singingi, sejalan dengan Mandey dkk. (2023) di Kabupaten Kepulauan Talaud serta Silaban dkk. (2020) di Sumatera Utara, yang keduanya juga mendapati hasil serupa.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Pengangguran merujuk pada bagian angkatan kerja yang belum memiliki pekerjaan namun tengah aktif mencarinya (Sukirno, 2004). TPT sendiri adalah rasio jumlah pengangguran terhadap total angkatan kerja pada suatu wilayah. Secara teoretis, tingginya TPT menandakan angkatan kerja belum terserap optimal ke dalam kegiatan produktif, sehingga individu yang menganggur kehilangan sumber penghasilan dan lebih rentan jatuh ke jurang kemiskinan (Sukirno, 2004).

Agus, Putra, dan Arka (2016) mendapati TPT berpengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan di kabupaten/kota Bali. Temuan senada juga diperoleh Nur Azizah dan Nur Asiyah (2022) di Jawa Timur. Kendati demikian, ada pula riset yang tidak menemukan hubungan signifikan antara TPT dan kemiskinan, sehingga relasi keduanya cenderung bergantung pada karakteristik pasar tenaga kerja masing-masing daerah.

Ketimpangan Pendapatan (Rasio Gini)

Rasio Gini digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan penduduk suatu wilayah, dengan rentang nilai 0 (pemerataan sempurna) hingga 1 (ketimpangan sempurna). Kuznets (1955) melalui hipotesisnya menyebutkan bahwa pada tahap awal pembangunan ekonomi, ketimpangan pendapatan cenderung membesar sebelum akhirnya mengecil seiring kematangan pembangunan (hipotesis U-terbalik).

Ketimpangan yang tinggi berpotensi memperparah kemiskinan sebab hasil pertumbuhan ekonomi tidak terbagi merata ke seluruh lapisan masyarakat, sehingga kelompok berpendapatan rendah tidak turut menikmati manfaatnya secara proporsional. Edna Safitri, Triwahyuningtyas, dan Sugianto (2022) mendapati bahwa ketimpangan menjadi salah satu determinan penting tingkat kemiskinan di Provinsi Banten.

Bourguignon (2004) merangkum kaitan ini dalam konsep poverty-growth-inequality triangle, yang menyatakan bahwa perubahan kemiskinan merupakan hasil gabungan dari pertumbuhan pendapatan rata-rata dan perubahan distribusi pendapatan secara bersamaan. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi yang dibarengi memburuknya distribusi pendapatan

dapat menghasilkan penurunan kemiskinan yang jauh di bawah ekspektasi. Kerangka inilah yang mendasari dimasukkannya Rasio Gini sebagai variabel penjelas berdampingan dengan PDRB per kapita dalam model penelitian ini.

Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

Merujuk pada kajian literatur di atas, tingkat kemiskinan suatu wilayah diperkirakan dipengaruhi oleh perpaduan antara kualitas sumber daya manusia, kinerja ekonomi daerah, kondisi pasar tenaga kerja, dan pemerataan pendapatan. IPM diperkirakan menekan kemiskinan melalui peningkatan produktivitas dan pendapatan penduduk. PDRB per kapita diperkirakan menurunkan kemiskinan melalui perluasan lapangan kerja dan kenaikan pendapatan masyarakat. TPT diperkirakan menaikkan kemiskinan karena penduduk yang menganggur kehilangan sumber penghasilan. Rasio Gini diperkirakan turut menaikkan kemiskinan sebab hasil pertumbuhan ekonomi yang tidak merata tidak dirasakan kelompok berpendapatan rendah. Dari kerangka pemikiran ini, hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut.

H1: IPM berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat.

H2: PDRB per kapita berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat.

H3: TPT berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat.

H4: Rasio Gini berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat.

H5: IPM, PDRB, TPT, dan Rasio Gini secara simultan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat.

METODE PENELITIAN

Studi ini tergolong penelitian kuantitatif asosiatif, yakni jenis penelitian yang menurut Sugiyono (2016) berupaya menjawab hubungan antara dua variabel atau lebih. Relasi yang diuji dalam penelitian ini bersifat kausal, yaitu hubungan sebab akibat antara variabel independen (yang memengaruhi) dan variabel dependen (yang dipengaruhi). Fokus kajian ini adalah pengaruh dan keterkaitan antara Tingkat Kemiskinan sebagai variabel terikat dengan IPM, PDRB per kapita, TPT, dan Rasio Gini sebagai variabel bebas, baik secara parsial maupun simultan.

Data yang digunakan bersifat sekunder dalam bentuk panel, bersumber dari BPS Provinsi Jawa Barat dan Open Data Jawa Barat. Cakupan penelitian meliputi 27 kabupaten/kota di Jawa Barat sepanjang 2017–2023, sehingga terbentuk 189 observasi dalam struktur panel seimbang (balanced panel). Rentang waktu penelitian dibatasi sampai 2023 karena sebagian data 2024–2025 masih berstatus sangat sementara/sementara dan berpotensi direvisi oleh BPS.

Definisi Operasional Variabel

Tabel 1. Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi Operasional	Satuan	Sumber Data
Kemiskinan (Y)	Persentase penduduk miskin terhadap total penduduk suatu wilayah	Persen (%)	BPS Provinsi Jawa Barat
IPM (X1)	Indeks komposit capaian pembangunan manusia (kesehatan, pendidikan, standar hidup)	Indeks (0–100)	BPS Provinsi Jawa Barat
PDRB (X2)	PDRB per kapita atas dasar harga konstan (ADHK) seri 2010, ditransformasi ke logaritma natural (ln)	Ribu Rupiah (ln)	BPS Provinsi Jawa Barat
TPT (X3)	Persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja	Persen (%)	Open Data Jawa Barat
Gini (X4)	Rasio ketimpangan distribusi pendapatan penduduk	Indeks (0–1)	Open Data Jawa Barat

Model Analisis

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan regresi data panel dengan persamaan sebagai berikut:

$$\text{Kemiskinan}_{it} = \beta_0 + \beta_1 \text{IPM}_{it} + \beta_2 \ln_ \text{PDRB}_{it} + \beta_3 \text{TPT}_{it} + \beta_4 \text{Gini}_{it} + \varepsilon_{it}$$

Di mana i mewakili unit wilayah (kabupaten/kota) dan t mewakili periode waktu (tahun). Estimasi dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu Common Effect Model (CEM),

Fixed Effect Model (FEM), dan Random Effect Model (REM), dengan model terbaik ditentukan melalui Uji Chow (CEM vs FEM) dan Uji Hausman (FEM vs REM). Selanjutnya dilakukan Uji Heteroskedastisitas (Modified Wald Test) dan Uji Autokorelasi (Wooldridge Test) guna memastikan model yang terpilih memenuhi asumsi klasik data panel. Jika ditemukan heteroskedastisitas dan/atau autokorelasi, estimasi akhir menggunakan standard error robust yang dikelompokkan (cluster) menurut unit wilayah agar inferensi statistik tetap dapat diandalkan.

Tahapan estimasi ini mengacu pada kerangka analisis data panel dari Baltagi (2021) dan Wooldridge (2010). Uji Chow pada dasarnya menguji kesamaan koefisien antarkelompok observasi (Chow, 1960) untuk melihat ada tidaknya efek individu antarwilayah, sementara Uji Hausman (Hausman, 1978) menguji korelasi antara efek individu dan variabel penjelas guna menentukan konsistensi estimator antara FEM dan REM. Heteroskedastisitas antarunit dideteksi melalui Modified Wald Test (Greene, 2018), sedangkan autokorelasi dideteksi dengan uji yang dikembangkan Wooldridge (2010) dan diterapkan secara praktis oleh Drukker (2003). Bila kedua masalah tersebut ditemukan, penggunaan standard error robust yang dikelompokkan pada tingkat wilayah menjadi koreksi standar agar inferensi statistik tetap valid (Baltagi, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum

Sepanjang 2017–2023, rata-rata tingkat kemiskinan di 27 kabupaten/kota Jawa Barat bergerak di kisaran 7,41 persen (2019) hingga 9,23 persen (2017), sempat naik selama pandemi COVID-19 (2020–2021) sebelum turun kembali menjadi 8,18 persen pada 2023. Pada 2023, IPM antarkabupaten/kota berada pada rentang 66,55–83,04, Rasio Gini berkisar 0,319–0,468, dan TPT berada di antara 1,52–10,52 persen, yang mencerminkan tingginya variasi kondisi sosial-ekonomi antarwilayah di Jawa Barat.

Uji Pemilihan Model

Model estimasi terbaik dipilih melalui Uji Chow dan Uji Hausman, dengan hasil berikut:

Tabel 2. Uji Pemilihan Model

Uji	Statistik	Nilai	Prob.	Keputusan
Chow (CEM vs FEM)	F	49,54	0,000	Pilih FEM
Hausman (FEM vs REM)	Chi ²	16,25	0,003	Pilih FEM

Uji Chow menghasilkan nilai F 49,54 dengan probabilitas 0,000 ($< 0,05$), yang berarti FEM lebih tepat digunakan dibanding CEM. Uji Hausman menghasilkan nilai Chi² 16,25 dengan probabilitas 0,003 ($< 0,05$), sehingga FEM kembali unggul dibanding REM.

Berdasarkan kedua hasil ini, FEM ditetapkan sebagai model yang digunakan dalam penelitian ini.

Uji Asumsi Klasik

Modified Wald Test menunjukkan probabilitas 0,000 ($< 0,05$), mengindikasikan adanya heteroskedastisitas dalam model. Wooldridge Test menghasilkan nilai F sebesar 785,17 dengan probabilitas 0,000 ($< 0,05$), yang menandakan adanya autokorelasi. Karena FEM terdeteksi mengandung kedua masalah tersebut sekaligus, estimasi akhir memakai standard error robust yang dikelompokkan (cluster) menurut unit wilayah (FEM Robust) agar nilai t dan signifikansi tetap dapat diandalkan.

Hasil Estimasi Regresi Data Panel

Tabel 3 menampilkan hasil estimasi keempat model (CEM, FEM, REM, dan FEM Robust). Mengacu pada hasil Uji Chow dan Uji Hausman, model FEM Robust (kolom 4) dipakai sebagai model akhir penelitian ini.

Tabel 3. Hasil Estimasi Regresi Data Panel

Variabel	CEM (1)	FEM (2)	REM (3)	FEM Robust (4)
IPM	-0,479*** (0,0370)	0,0210 (0,0895)	-0,183*** (0,0614)	0,0210 (0,0720)
ln_PDRB	-0,516 (0,328)	-2,884** (1,298)	-1,169 (0,726)	-2,884** (1,354)
TPT	0,0460 (0,0655)	0,0848** (0,0424)	0,0562 (0,0421)	0,0848*** (0,0292)
Gini	16,75*** (4,047)	4,860** (2,190)	5,074** (2,225)	4,860* (2,596)
Constant	41,43*** (2,768)	33,60*** (8,728)	31,06*** (5,381)	33,60*** (10,02)
Observasi	189	189	189	189
R-squared	0,578	0,097	—	0,097
Jumlah wilayah	27	27	27	27

*Standard errors dalam kurung. *** $p < 0,01$, ** $p < 0,05$, * $p < 0,1$.*

Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Tingkat Kemiskinan

Model FEM Robust menghasilkan koefisien IPM 0,0210 dengan standard error 0,0720, yang tidak signifikan pada taraf berapa pun. Dengan demikian, hipotesis H1 yang menyatakan bahwa IPM berpengaruh negatif terhadap kemiskinan tidak terbukti dalam data ini, karena IPM tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan pada model FEM.

Menariknya, koefisien IPM pada model CEM dan REM justru signifikan (berturut-turut $-0,479^{***}$ dan $-0,183^{***}$). Perbedaan ini sejalan dengan hasil Uji Hausman yang memang menunjukkan adanya perbedaan sistematis antara estimasi FEM dan REM. CEM dan REM lebih banyak menangkap variasi antarwilayah (cross-sectional), yaitu wilayah dengan IPM tinggi umumnya juga memiliki kemiskinan rendah, sementara FEM menangkap variasi dalam satu wilayah sepanjang waktu (within variation). Karena IPM bergerak relatif stabil dan bertahap setiap tahun di masing-masing wilayah, variasi tahun-ke-tahunnya kurang cukup besar untuk terdeteksi berpengaruh signifikan terhadap perubahan kemiskinan dalam kerangka FEM.

Hasil tidak signifikan ini sejalan dengan Anandanisa (2018) yang juga tidak menemukan pengaruh IPM yang signifikan terhadap kemiskinan di Papua, serta Susilowati dan Suliswanto (2015) yang tidak mendapati kaitan antara komponen IPM dengan kemiskinan di Indonesia. Hal ini mengisyaratkan bahwa kenaikan IPM secara agregat di suatu wilayah belum tentu langsung dan konsisten menekan kemiskinan dalam jangka pendek, kemungkinan karena manfaat perbaikan pendidikan dan kesehatan baru terwujud sebagai kenaikan pendapatan dalam rentang waktu yang lebih panjang.

Inkonsistensi pengaruh IPM antarwilayah juga tampak pada riset-riset terbaru di provinsi lain di Pulau Jawa. Ningsih, Bomantara, dan Rahmawati (2024), yang meneliti Jawa Barat secara spesifik pada 2023 dengan pendekatan cross-section, justru menemukan IPM berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan. Perbedaan ini kemungkinan besar berasal dari sumber variasi yang berbeda: pendekatan cross-section pada dasarnya menangkap variasi antarwilayah (between variation) yang memang lebih besar, sedangkan FEM secara khusus mengisolasi variasi within yang jauh lebih kecil karena IPM bergerak stabil dari tahun ke tahun di setiap wilayah. Ini memperkuat dugaan bahwa manfaat kenaikan IPM terhadap penurunan kemiskinan lebih tepat dipahami sebagai fenomena struktural antarwilayah dalam jangka panjang, bukan fenomena dinamis tahun-ke-tahun pada wilayah yang sama.

Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Tingkat Kemiskinan

Koefisien $\ln_PDRB$ pada model FEM Robust sebesar $-2,884$ dan signifikan pada taraf 5 persen ($p < 0,05$), sehingga H_2 terbukti. Secara ekonomi, hal ini berarti kenaikan PDRB per kapita sebesar 1 persen berkaitan dengan penurunan tingkat kemiskinan sekitar 0,029 poin persentase (*ceteris paribus*). Di antara keempat model yang diestimasi, PDRB secara konsisten menunjukkan arah negatif dan menjadi variabel dengan dampak paling besar terhadap kemiskinan dibanding variabel lain yang diteliti.

Hasil ini sejalan dengan Silastri (2017) di Kabupaten Kuantan Singingi, Mandey dkk. (2023) di Kabupaten Kepulauan Talaud, dan Silaban dkk. (2020) di Sumatera Utara, yang sama-sama mendapati pengaruh negatif signifikan PDRB terhadap kemiskinan. Hal ini menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah, yang tercermin dari kenaikan PDRB per kapita, memegang peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan sekaligus menekan kemiskinan di kabupaten/kota Jawa Barat.

Konsistensi arah pengaruh PDRB per kapita ini juga didukung Falah dan Rahmawati (2024) di Jawa Timur, yang menemukan PDRB per kapita berpengaruh negatif terhadap kemiskinan baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek menggunakan pendekatan error correction model. Secara teoretis, temuan ini sejalan dengan argumen elastisitas

pertumbuhan terhadap kemiskinan dari Ravallion dan Chen (1997) serta Dollar dan Kraay (2002), yaitu kenaikan pendapatan rata-rata suatu wilayah umumnya diikuti penurunan proporsi penduduk miskin, sepanjang manfaat pertumbuhan tersebut turut dirasakan kelompok berpendapatan rendah. Meskipun demikian, Bourguignon (2004) mengingatkan bahwa besarnya penurunan kemiskinan akibat pertumbuhan ekonomi tetap bergantung pada kondisi distribusi pendapatan yang berlaku, sebagaimana tercermin dari pengaruh positif signifikan Rasio Gini yang juga ditemukan dalam penelitian ini.

Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terhadap Tingkat Kemiskinan

Koefisien TPT pada model FEM Robust sebesar 0,0848 dan signifikan pada taraf 1 persen ($p < 0,01$), yaitu signifikansi terkuat di antara seluruh variabel yang diteliti. Hasil ini mendukung H3: kenaikan TPT sebesar 1 poin persentase berkaitan dengan kenaikan tingkat kemiskinan sebesar 0,0848 poin persentase.

Temuan ini sejalan dengan Agus, Putra, dan Arka (2016) di Bali serta Nur Azizah dan Nur Asiyah (2022) di Jawa Timur, yang sama-sama mendapati pengaruh positif signifikan pengangguran terhadap kemiskinan. Hal ini menegaskan bahwa penduduk yang menganggur kehilangan sumber penghasilan utamanya, sehingga semakin tinggi TPT suatu wilayah, semakin besar pula peluang penduduknya terjerumus ke dalam kemiskinan. Hasil ini menggarisbawahi pentingnya perluasan lapangan kerja sebagai salah satu strategi utama pengentasan kemiskinan di Jawa Barat.

Namun demikian, tidak semua studi terbaru menemukan pengaruh TPT yang signifikan. Ningsih, Bomantara, dan Rahmawati (2024), misalnya, mendapati bahwa TPT tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di kabupaten/kota Jawa Barat pada 2023, dengan argumen bahwa pengangguran terbuka bukan satu-satunya determinan utama kemiskinan ketika sektor informal masih cukup aktif menyerap tenaga kerja. Perbedaan ini kemungkinan muncul karena cakupan periode yang lebih panjang (2017–2023) dalam penelitian ini turut menangkap lonjakan pengangguran selama pandemi COVID-19 beserta proses pemulihannya, sehingga variasi tahun-ke-tahun TPT yang ditangkap model FEM menjadi lebih besar dan lebih mampu mendeteksi pengaruhnya terhadap kemiskinan dibanding data satu tahun saja.

Pengaruh Rasio Gini terhadap Tingkat Kemiskinan

Koefisien Gini pada model FEM Robust sebesar 4,860 dan signifikan pada taraf 10 persen ($p < 0,1$), sehingga H4 terbukti, meskipun dengan tingkat signifikansi yang relatif lebih lemah dibanding PDRB dan TPT. Artinya, kenaikan Rasio Gini sebesar 0,01 poin berkaitan dengan kenaikan tingkat kemiskinan sekitar 0,049 poin persentase.

Temuan ini konsisten dengan hipotesis Kuznets (1955) bahwa ketimpangan pendapatan yang tinggi dapat menghambat penurunan kemiskinan, karena manfaat pertumbuhan ekonomi tidak tersebar merata ke seluruh lapisan masyarakat. Signifikansi yang relatif lemah (hanya pada taraf 10 persen) mengindikasikan bahwa pengaruh ketimpangan pendapatan terhadap kemiskinan di kabupaten/kota Jawa Barat pada 2017–2023 memang konsisten arahnya, tetapi tidak sekuat pengaruh PDRB dan TPT, sehingga tetap perlu mendapat perhatian dalam kebijakan pemerataan pendapatan.

Temuan mengenai Rasio Gini ini melengkapi bukti bahwa dimensi distribusi pendapatan tidak bisa diabaikan dalam menyusun strategi pengentasan kemiskinan, selaras dengan kerangka poverty-growth-inequality triangle dari Bourguignon (2004). Dalam kerangka itu, perubahan tingkat kemiskinan pada dasarnya merupakan fungsi gabungan dari pertumbuhan pendapatan rata-rata dan perubahan ketimpangan distribusinya, sehingga strategi yang hanya berfokus pada akselerasi pertumbuhan ekonomi tanpa disertai upaya pemerataan berisiko menghasilkan penurunan kemiskinan yang jauh lebih kecil dari potensi sesungguhnya. Hal ini relevan mengingat Rasio Gini Jawa Barat masih tergolong ketimpangan sedang hingga saat ini, sehingga pemerataan pendapatan tetap perlu menjadi perhatian kebijakan yang berjalan beriringan dengan penguatan pertumbuhan ekonomi daerah.

Pengaruh Simultan

Hasil uji simultan mengonfirmasi bahwa keempat variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Pada model FEM (tanpa robust), diperoleh nilai $F(4, 158)$ sebesar 4,27 dengan probabilitas 0,0026 ($< 0,05$). Pada model FEM Robust yang menjadi model akhir penelitian ini, penggunaan standard error cluster mengubah derajat bebas penyebut mengikuti jumlah klaster wilayah, sehingga diperoleh $F(4, 26)$ sebesar 6,02 dengan probabilitas 0,0014 ($< 0,05$). Kedua hasil ini secara konsisten menunjukkan bahwa H_5 terbukti: IPM, PDRB per kapita, TPT, dan Rasio Gini secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten/kota Jawa Barat periode 2017–2023.

Nilai R-squared model FEM sebesar 0,097 menunjukkan bahwa keempat variabel bebas (IPM, PDRB, TPT, dan Gini) secara bersama-sama hanya mampu menjelaskan sekitar 9,7 persen variasi within tingkat kemiskinan antarwaktu di kabupaten/kota Jawa Barat, sementara sisanya dijelaskan faktor-faktor lain di luar model. Nilai R-squared within yang relatif kecil ini wajar terjadi pada estimasi FEM, sebab model tersebut hanya menangkap variasi dalam satu wilayah sepanjang waktu (within variation), sementara sebagian besar keragaman kemiskinan antarwilayah sudah terserap ke dalam efek tetap (fixed effects) masing-masing kabupaten/kota dan tidak lagi tercermin dalam R-squared within itu sendiri.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari empat hipotesis pengaruh parsial yang diajukan, tiga di antaranya (H_2 , H_3 , dan H_4) terbukti didukung data, sementara H_1 tidak terbukti. IPM tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten/kota Jawa Barat pada model FEM, meskipun signifikan pada model CEM dan REM. Perbedaan ini sejalan dengan hasil Uji Hausman yang memang mengindikasikan adanya perbedaan sistematis antara kedua pendekatan tersebut. PDRB per kapita berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan, menandakan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah berperan penting dalam menekan kemiskinan. TPT berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kemiskinan dengan signifikansi terkuat di antara seluruh variabel yang diteliti. Rasio Gini berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan, meskipun dengan signifikansi yang relatif lemah (taraf 10 persen).

Berdasarkan temuan tersebut, pemerintah daerah di Jawa Barat disarankan memprioritaskan dua aspek yang terbukti paling berpengaruh dalam strategi pengentasan kemiskinan: penguatan pertumbuhan ekonomi daerah (melalui dukungan terhadap UMKM, investasi, dan pemanfaatan sumber daya lokal) serta perluasan kesempatan kerja (melalui

pelatihan vokasi, kemitraan dengan industri, dan penciptaan lapangan kerja formal). Kebijakan pemerataan pendapatan, seperti perpajakan progresif dan perlindungan sosial yang tepat sasaran, juga perlu terus diperkuat untuk mengatasi ketimpangan yang turut berkontribusi terhadap kemiskinan. Di sisi lain, kebijakan peningkatan IPM (pendidikan dan kesehatan) tetap penting sebagai investasi jangka panjang, sekalipun dampaknya terhadap penurunan kemiskinan dalam jangka pendek tidak selalu langsung terlihat.

Studi ini memiliki sejumlah keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam menafsirkan hasilnya. Pertama, nilai R-squared model FEM tergolong kecil (0,097), yang mengindikasikan adanya faktor-faktor lain di luar IPM, PDRB, TPT, dan Gini yang turut memengaruhi variasi kemiskinan antarwaktu di tiap wilayah, misalnya kebijakan lokal, infrastruktur, atau karakteristik sektor ekonomi setempat yang belum dimasukkan ke dalam model. Kedua, rentang penelitian dibatasi hingga 2023 karena sebagian data 2024–2025 masih bersifat sangat sementara/sementara, sehingga generalisasi hasil sebaiknya dibatasi pada periode 2017–2023. Ketiga, hasil estimasi menunjukkan sensitivitas terhadap periode data yang digunakan, yaitu pengujian pada rentang tahun berbeda (2018–2023 dan 2018–2024) menghasilkan signifikansi IPM dan Gini yang berbeda-beda, sehingga hasil penelitian ini sebaiknya dimaknai sebagai estimasi yang berlaku khusus untuk periode 2017–2023, bukan generalisasi mutlak untuk periode lain. Penelitian selanjutnya disarankan memperluas cakupan tahun pengamatan setelah data resmi tahun-tahun mendatang tersedia secara final, serta mempertimbangkan variabel tambahan seperti tingkat partisipasi angkatan kerja, alokasi belanja pemerintah daerah, atau indikator infrastruktur guna memperkuat daya jelas model.

DAFTAR REFERENSI

- Agus, I. K., Putra, A., & Arka, S. (2016). Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Kesempatan Kerja, dan Tingkat Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*.
- Anandanisa, N. P. (2018). *Analisis Kemiskinan di Provinsi Papua*. Universitas Islam Indonesia.
- Badan Pusat Statistik (2023). Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, 2023 - Tabel Statistik. Bps.go.id; Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat.
- Badan Pusat Statistik (2024). Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Barat - Tabel Statistik. Bps.go.id; Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. <https://jabar.bps.go.id/id/statistics-table/2/OTE5IzI=/persentase-penduduk-miskin-menurut-kabupaten-kota-di-jawa-barat.html>
- Baltagi, B. H. (2021). *Econometric Analysis of Panel Data* (6th ed.). Cham: Springer.
- Becker, G. S. (1964). *Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education*. New York: Columbia University Press for the National Bureau of Economic Research.
- Bourguignon, F. (2004). *The Poverty-Growth-Inequality Triangle*. Indian Council for Research on International Economic Relations (ICRIER) Working Paper No. 125. New Delhi.
- Chow, G. C. (1960). Tests of Equality Between Sets of Coefficients in Two Linear

- Regressions. *Econometrica*, 28(3), 591–605.
- Dollar, D., & Kraay, A. (2002). Growth Is Good for the Poor. *Journal of Economic Growth*, 7(3), 195–225. <https://doi.org/10.1023/A:1020139631000>
- Drukker, D. M. (2003). Testing for Serial Correlation in Linear Panel-Data Models. *The Stata Journal*, 3(2), 168–177.
- Edna Safitri, S., Triwahyuningtyas, N., & Sugianto, S. (2022). Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Tingkat Kemiskinan di Provinsi Banten. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan*, 1(4). <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i4.30>
- Greene, W. H. (2018). *Econometric Analysis* (8th ed.). New York: Pearson.
- Haughton, J., & Khandker, S. R. (2009). *Handbook on Poverty and Inequality*. Washington, DC: The World Bank.
- Hausman, J. A. (1978). Specification Tests in Econometrics. *Econometrica*, 46(6), 1251–1271.
- Kuznets, S. (1955). Economic Growth and Income Inequality. *The American Economic Review*, 45(1), 1–28.
- Mandey, D. R., Engka, D. S. M., & Siwu, H. F. D. (2023). Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Rata-Rata Lama Sekolah, dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 23(1).
- Nur Azizah, A., & Nur Asiyah, B. (2022). Pengaruh Jumlah Penduduk, Indeks Pembangunan Manusia, Produk Domestik Regional Bruto, dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Jawa Timur. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan*, 1(12). <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i12.420>
- Falah, M. A., & Rahmawati, F. (2024). The GRDP per Capita, Human Development Index, Open Unemployment Rate, Regional Expenditure, and Poverty in East Java Province. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 25(1), 1–16. <https://doi.org/10.18196/jesp.v25i1.21327>
- Ningsih, K. A., Bomantara, C. A., & Rahmawati, R. (2024). An Empirical Analysis of Unemployment, Human Development Index, and Economic Growth as Determinants of Poverty in West Java Province, 2023. *Indonesian Journal of Adult and Community Education*, 6(2), 96–106. <https://doi.org/10.17509/ijace.v6i2.86841>
- Ravallion, M. (1997). Can High-Inequality Developing Countries Escape Absolute Poverty? *Economics Letters*, 56(1), 51–57.
- Ravallion, M., & Chen, S. (1997). What Can New Survey Data Tell Us about Recent Changes in Distribution and Poverty? *The World Bank Economic Review*, 11(2), 357–382.
- Schultz, T. W. (1961). Investment in Human Capital. *The American Economic Review*, 51(1), 1–17.
- Sen, A. (1999). *Development as Freedom*. Oxford: Oxford University Press.
- Silaban, P. S. M. J., Br Sembiring, P. S., Br Sitepu, V. A., & Br Sembiring, J. P. (2020). The

- Pengaruh IPM dan PDRB terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Sumatera Utara Tahun 2002-2017. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 4(1). <https://doi.org/10.36778/jesya.v4i1.288>
- Silastri, N., Iyan, R. Y., & Sari, L. (2017). Pengaruh Jumlah Penduduk dan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Kemiskinan di Kabupaten Kuantan Singingi. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 4(1), 105–117.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukirno, S. (2004). *Makro Ekonomi: Teori Pengantar* (Edisi ke-15). Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Suryawati, C. (2004). Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional. *Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan*, 8(3), 121–129.
- Susilowati, D. & Suliswanto, M. (2015). Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, Utang Luar Negeri dan Kemiskinan (Kajian Teoritis di Indonesia). *Journal of Innovation in Business and Economics*, 6(1), 89.
- Syaifullah, A., & Malik, N. (2017). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan Produk Domestik Bruto terhadap Tingkat Kemiskinan di ASEAN-4. *Jurnal Ilmu Ekonomi JIE*, 1(1), 107–119.
- Wooldridge, J. M. (2010). *Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data* (2nd ed.). Cambridge, MA: MIT Press.
- Zanzibar, D., Rahmadhan, F., Kiswanda, R., & Rohmi, M. L. (2024). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di Jawa Timur. *Jurnal Economina*, 3(4), 562–574. <https://doi.org/10.55681/economina.v3i4.1296>